



## PROVINSI SULAWESI UTARA

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020

#### TENTANG

### PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2020

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka perencanaan pembentukan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara yang terarah terprogram dan sesuai prioritas, maka perlu disusun dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2020;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disepakati oleh badan pembentukan peraturan daerah DPRD kabupaten bolaang mongondow utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tanggal 7 Januari 2020;  
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Tanggal 27 Februari Tahun 2020.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara Tahun 2020. (Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini).
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Boroko  
Pada Tanggal: 27 Februari 2020

**PIMPINAN DPRD  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA  
KETUA,**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DPRD  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**Drs. MUSLIMAN DATUKRAMAT, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C**  
**NIP. 196904031997101002**

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020.

**DAFTAR RANPERDA  
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2020**

| No  | Jenis                      | Tentang   |
|-----|----------------------------|---|
| 1.  | Rancangan Peraturan Daerah | Irigasi   |
| 2.  | Rancangan Peraturan Daerah | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033 |
| 3.  | Rancangan Peraturan Daerah | RDTR kawasan Ibu kota Kabupaten   |
| 4.  | Rancangan Peraturan Daerah | Biaya Transportasi Jemaah Haji  |
| 5.  | Rancangan Peraturan Daerah | Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  |
| 6.  | Rancangan Peraturan Daerah | Penanaman Modal   |
| 7.  | Rancangan Peraturan Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah   |
| 8.  | Rancangan Peraturan Daerah | Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak  |
| 9.  | Rancangan Peraturan Daerah | Kabupaten Layak Anak  |
| 10. | Rancangan Peraturan Daerah | Ketentraman dan Ketertiban Umum   |
| 11. | Rancangan Peraturan Daerah | Pendirian BUMD Anugerah Nusantara Jaya  |
| 12. | Rancangan Peraturan Daerah | Penyertaan Modal BUMD   |
|     | Rancangan Peraturan        | Pengelolaan Sarang Burung Walet   |

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 14. | Daerah                     | Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 15. | Rancangan Peraturan Daerah | Izin Mendirikan Bangunan  |
| 16. | Rancangan Peraturan Daerah | Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah   |
| 17. | Rancangan Peraturan Daerah | Corporate Social Responsibility ( Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Perusahaan)            |
| 18. | Rancangan Peraturan Daerah | Pembentukan P2TP2A  |
| 19. | Rancangan Peraturan Daerah | Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  |
| 20. | Rancangan Peraturan Daerah | Rencana Induk Teknologi Infomasi Dan Komunikasi   |
| 21. | Rancangan Peraturan Daerah | Lembaga Penyiaran Public Lokal(LPPL)<br>Radio Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara    |
| 22. | Rancangan Peraturan Daerah | Penyelenggaraan keolahragaan  |
| 23. | Rancangan Peraturan Daerah | Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019                                      |
| 24. | Rancangan Peraturan Daerah | Perubahan atas peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2020                              |
| 25. | Rancangan Peraturan Daerah | Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021                                    |
| 26. | Rancangan Peraturan Daerah | Izin Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah                              |
| 27. | Rancangan Peraturan Daerah | Penertiban Hewan Lepas  |
| 28. | Rancangan Peraturan Daerah | Bantuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin                                     |
| 29. | Rancangan Peraturan Daerah | Pemuda  |
| 30. | Rancangan Peraturan Daerah | Pengangkatan dan Pemberhentian BPD  |

|     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| 32. | Rancangan Peraturan Daerah | Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa  |
| 33. | Rancangan Peraturan Daerah | Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan |
| 34  | Rancangan Peraturan Daerah | Bangunan Gedung  |

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 27 Februari 2020

**PIMPINAN DPRD  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA  
KETUA,**



FRANGKY CHENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**EKRETARIAT DEWAN**  
Drs. MUSLIMAN DATUKRAMAT, M.Si  
**PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C**  
NIP. 196904031997101002